

Faktor Yang Mempengaruhi Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Pengelolaan Laporan Di Puskesmas Klego 1

Arum Putri Nur Fatimah¹, Taraka Adi Candra Wibawa²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

e-mail : arummputryyy@gmail.com¹ Wibawaoke1@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perolehan opini WTP pada pengelolaan laporan keuangan di Puskesmas Klego 1. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak pengelola keuangan Puskesmas Klego 1, studi dokumentasi berupa laporan keuangan dan laporan hasil audit auditor independen, serta kajian literatur dari jurnal dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Klego 1 telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari auditor independen. Faktor-faktor utama yang memengaruhi perolehan opini WTP meliputi kompetensi sumber daya manusia yang memadai, penerapan sistem pengendalian internal yang efektif, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perolehan opini WTP tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan laporan keuangan di Puskesmas Klego 1 telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung peningkatan tata kelola keuangan dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kata kunci: Opini WTP, Pengelolaan Keuangan, Puskesmas, Audit, Akuntabilitas Publik

Abstract

This study aims to analyze the factors influencing the achievement of an unqualified audit opinion on financial statement management at Puskesmas Klego 1. This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with financial management personnel at Puskesmas Klego 1, documentation review of financial statements and independent audit reports, and literature review of relevant journals and regulations. The results indicate that Puskesmas Klego 1 has prepared its financial statements in accordance with Government Accounting Standards as stipulated in Government Regulation Number 71 of 2010 and has obtained an unqualified opinion from an independent auditor. The main factors influencing the achievement of the unqualified opinion include adequate human resource competence, effective implementation of internal control systems, and compliance with applicable accounting standards and regulations. The achievement of an unqualified opinion demonstrates that financial statement management at Puskesmas Klego 1 has been conducted accountably and responsibly, thereby supporting improved financial governance and the quality of public health services.

Keywords: Unqualified Opinion, Financial Management, Community Health Center, Audit, Public Accountability

1. PENDAHULUAN

Pemenkes (2019), Pusat Kesehatan Masyarakat yang disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Depkes RI (2004), Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kesehatan. Pelayanan puskesmas yang diberikan meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, keberadaan puskesmas menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Puskesmas merupakan salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengelola keuangan secara mandiri. Puskesmas sebagai BLUD wajib membuat laporan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan menggunakan basis akrual. Laporan keuangan yang disusun berperan penting sebagai sarana pertanggungjawaban terhadap masyarakat mengenai pengelolaan dana publik untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Laporan keuangan adalah catatan resmi kinerja keuangan mengenai pemasukan dan pengeluaran suatu entitas dalam periode tertentu. Laporan keuangan yang perlu dibuat oleh puskesmas, di antaranya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya audit laporan keuangan atas semua komponen laporan keuangan puskesmas.

Secara umum, audit merupakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan untuk memberikan pendapat apakah laporan disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Bagi puskesmas, laporan keuangan berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja keuangan dalam menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sedangkan bagi auditor, laporan keuangan berperan penting dalam proses audit untuk menilai kewajaran pengelolaan dana publik sesuai dengan pencatatan dan penyajian transaksi keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menilai efektivitas pengendalian intern, serta kepatuhan puskesmas dalam mengikuti kegiatan operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan prosedur audit laporan keuangan, auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap seluruh akun yang ada di laporan keuangan puskesmas.

Terdapat dua jenis audit, yaitu audit internal yang dilakukan oleh unit yang berada di perusahaan tersebut, sedangkan audit eksternal dilakukan oleh pihak ketiga yang bersifat independen seperti Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Audit memainkan peran kunci dalam mendukung prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban. Prinsip ini penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Audit eksternal juga dapat mendorong akuntabilitas manajemen terhadap dewan komisaris dan pemegang saham. Opini auditor menjadi dasar bagi pemilik modal untuk menilai kinerja manajemen. Puskesmas Klego 1 mengaudit laporan keuangannya dengan audit independen yaitu ARNESTESA KAP.

2. METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan menggambarkan dan menganalisis objek berdasarkan fakta atau apa adanya. Sedangkan pendekatan studi kasus adalah pendekatan untuk mempelajari suatu objek secara mendalam, pertanyaan pada studi kasus tidak hanya menggunakan “apa, siapa, dimana” namun yang harus “bagaimana” untuk menggali suatu kasus secara mendalam dan dapat menjelaskan bagaimana kasus tersebut terjadi.

Tujuan pada penelitian ini untuk menggambarkan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan di Puskesmas Klego 1. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara langsung di Puskesmas Klego 1 yang beralamat di Jalan Raya Klego – Karanggede, KM 7, Klego, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dengan pihak pengelola keuangan Puskesmas Klego 1 Ibu Ambarwati, A.Md., E,Sy dan Ibu Nurul Qodariyah, A.Md., pada Senin, 29 Desember 2025 di Puskesmas Klego 1, Boyolali. Pada wawancara tersebut peneliti memperoleh data sekunder seperti jenis laporan keuangan, dan laporan auditor independen yang dilakukan

oleh ARNESTESA KAP, serta peneliti menggunakan data dari berbagai jurnal yang telah dipublikasikan, serta situs web pemerintah untuk memperkuat hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS KLEGO 1

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola keuangan Puskesmas Klego 1, diperoleh informasi bahwa Puskesmas Klego 1 menyusun beberapa laporan keuangan, diantaranya Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan di Puskesmas Klego 1 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana diungkapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Jenis laporan keuangan:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu bentuk laporan keuangan mengenai perbandingan anggaran yang ditetapkan dengan realisasi pendapatan, transfer, dan pemberian pada periode tertentu. Realisasi pendapatan puskesmas berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber pendanaan lain yang sah.

2. Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan keuangan yang menunjukkan sisa lebih anggaran antara pendapatan dan belanja dari tahun sebelumnya. SAL menggambarkan kemampuan Puskesmas Klego 1 dalam mengelola keuangan dengan tepat dan efisien, serta dapat digunakan untuk pemberian kegiatan yang mendadak.

3. Laporan Neraca

Laporan Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas puskesmas. Laporan neraca berfungsi untuk menunjukkan keuangan puskesmas secara menyeluruh seperti kecukupan dana, alokasi sumber daya, dan kondisi keuangan Puskesmas Klego 1.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ringkasan sumber daya ekonomi seperti pendapatan dan beban operasional puskesmas dalam satu periode. Laporan ini menggambarkan kinerja operasional dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan keuangan yang berisi mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam periode akuntansi tertentu. Beberapa isi laporan yaitu aktivitas operasi (pendapatan jasa layanan, belanja pegawai), aktivitas investasi (pembelian dan penjualan aset), dan aktivitas pendanaan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

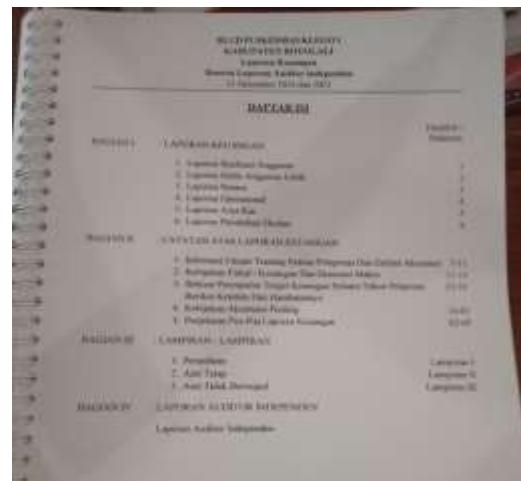
Laporan Perubahan Ekuitas laporan yang menggambarkan selisih antara aset dan kewajiban dari aktivitas operasional dan kebijakan keuangan yang diterapkan. LPE umumnya berisi ekuitas awal (kekayaan bersih puskesmas), surplus atau defisit (selisih antara pendapatan dan beban operasional puskesmas), ekuitas akhir.

7. Laporan CALK

Laporan CALK berisi penjelasan rinci atas informasi dari laporan keuangan sebelumnya. Penyajian CALK secara lengkap dan jelas di Puskesmas Klego 1 mendukung adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.



Gambar 1. Proses wawancara



Gambar 2. Laporan Keuangan Puskesmas

B. HASIL TEMUAN AUDIT DI PUSKESMAS KLEGO 1

Proses audit laporan keuangan dilaksanakan secara rutin oleh auditor independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit dilakukan terhadap laporan keuangan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Berdasarkan hasil audit oleh audit independen di Puskesmas Klego 1 menghasilkan temuan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut merupakan opini audit tertinggi yang menandakan bahwa laporan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, bebas dari salah saji, dan memenuhi standar audit. Dalam puskesmas, opini WTP menjadi dasar untuk mempertahankan praktik kelola keuangan yang baik serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Puskesmas Klego 1 mendapatkan opini WTP:

1. Kompetensi SDM terhadap opini WTP

Kualitas laporan keuangan di puskesmas sangat bergantung pada kualitas SDM. Kompetensi SDM yang berintegritas tinggi menjadi kunci dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompetensi yang dimaksud yaitu kemampuan teknis, keahlian interpersonal, serta kemampuan beradaptasi. Menurut Keputusan Direktorat Kepegawaian Negara Nomor 46 A Tahun 2003, indikator kompetensi sumber daya manusia diukur melalui unsur pengetahuan yang mencakup pemahaman terhadap fakta dan data terkait aspek teknis, serta keterampilan profesional yang tercermin dalam kemampuan melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan tingkat aktivitas yang minimal. Kemampuan sikap yang menunjukkan kepada atasan atau orang lain bahwa orang tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja. Dalam upaya mencapai Good Governance, peran sumber daya manusia sangat signifikan dan menjadi pendorong utama keberhasilan suatu entitas.

2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern di puskesmas diterapkan dengan pemisahan tugas antara pihak perencanaan anggaran, pelaksana kegiatan, pencatatan transaksi dan penyimpanan dokumen, tujuan pemisahan tugas untuk mencegah kesalahan dan

kecurangan, meminimalkan risiko kesalahan pencatatan, sehingga meningkatkan akurasi data, efisiensi kualitas laporan keuangan. SPI di puskesmas dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh kepala puskesmas dan Dinas Kesehatan terkait.

3. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

SAP merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan akuntansi yang digunakan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. SAP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010. Puskesmas Klego 1 telah mematuhi peraturan untuk menggunakan SAP dalam penyusunan laporan keuangannya, sebagai contoh pada Laporan Realisasi Anggaran, transaksi dicatat berdasarkan bukti yang sah dan diakui pada periode terjadinya transaksi.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada Puskesmas Klego 1 menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan disusun secara akuntabilitas dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Perolehan opini tersebut memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, serta menandakan bahwa pengendalian internal di Puskesmas Klego 1 berjalan dengan efektif sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Keberhasilan Puskesmas Klego 1 mendapatkan Opini WTP tidak hanya berdampak bagi keuangan, namun juga mendukung peningkatan kualitas, pelayanan kesehatan dengan cara pengelolaan sumber daya keuangan yang lebih tertib, efisien dan bertanggung jawab.



Gambar 3. Hasil Audit Puskesmas



Gambar 4. Dokumentasi dengan staf keuangan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan laporan keuangan di Puskesmas Klego 1 telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Puskesmas Klego 1 menyusun laporan keuangan secara lengkap dan sistematis yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan tersebut telah mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Hasil audit laporan keuangan oleh auditor independen menunjukkan bahwa Puskesmas Klego 1 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menandakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, bebas dari salah saji, serta telah memenuhi standar akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perolehan opini WTP tersebut menunjukkan bahwa tata kelola keuangan di Puskesmas Klego 1 telah berjalan dengan baik. Faktor-faktor utama yang memengaruhi perolehan opini WTP di Puskesmas Klego 1 meliputi kompetensi sumber daya manusia yang memadai dalam bidang pengelolaan keuangan, penerapan sistem pengendalian internal yang efektif, serta tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dan regulasi terkait. Ketiga faktor tersebut saling mendukung dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, keberhasilan Puskesmas Klego 1 dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian tidak hanya berdampak pada aspek administrasi dan pengelolaan keuangan, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pengelolaan sumber daya keuangan yang tertib, efisien, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Kementerian Kesehatan RI
- Sanah, N. (2017). Pelaksanaan fungsi puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 305-314.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Kementerian Kesehatan RI.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Kepala Badan Kepegawaian Negara. (2003). *Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46a Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta. KepKa BKN.
- Fadiah, A., Yuliana, S., & Desi, I. (2025). *Analisis Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan Kompetensi Sdm Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Pada Puskesmas 23 Ilir Kota Palembang*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah: Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor, 7(3).
- Ridlo, U. (2023). *Metode Penelitian Studi Kasus : Teori dan Praktik*. Jakarta Selatan. Publica Indonesia Utama.
- Ayuningtias, P. M., & Suryaningrum, D. H. (2024). *Analisis Prosedur Audit Kas Setara Kas BLUD Puskesmas X Oleh KAP ENHA*. AKUNTANSI 45, 5(2), 394-405.